

PENGARUH PERSPEKTIF FEMINIS DALAM PROGRAM UNIFEM PADA KONFLIK SIPIL DARFUR 2006-2010

Rahmi Yulia

Pembimbing: Yessi Olivia, S.IP. M.Int. Rel

Abstrak

This research describes the influence of the feminist perspective on the work program of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) post-conflict in Darfur in 2006 and 2010. Darfur is a region in Sudan, with the most severe civil conflict. Rape and sexual violence to be one tool in the war. Women and children should be protected when the conflict became the most casualties. UNIFEM as an organization that focuses on the welfare and gender equality down to protect women victims of conflict. This research explains Feminist influence within the program of work of UNIFEM in Darfur with a reference for UNIFEM to protect women from rape and GBV which is the effect of the civil conflict that occurred in Darfur.

Key word: Civil conflict, Feminist, rape, Gender Base Violence (GBV).

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari perspektif feminis dalam program UNIFEM pasca konflik sipil yang terjadi di Darfur. Terkait dengan program kerja dari *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM). UNIFEM adalah badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah naungan UN Women yang bergerak dalam perlindungan dan upaya penyeteraan jender.

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami konflik internal. Konflik internal telah berlangsung dari tahun 1989 dan menjadi permasalahan yang kompleks. Berbagai konflik yang terjadi di Sudan ini berujung pada pemisahan antara negara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada tahun 2011. Konflik yang terjadi di Sudan terbagi dua, pertama konflik mengenai kasus Sudan Selatan dan Sudan Utara dan kedua adalah konflik Darfur.

Darfur merupakan daerah yang mengalami dampak konflik yang paling besar. Darfur adalah sebuah provinsi di negara Sudan bagian barat. Darfur terdiri dari penduduk yang multi etnis dan agama. Berbagai kepentingan dari kelompok yang berbeda-beda menjadi salah satu sumber konflik. Sejak tahun 2003 konflik di Darfur semakin memanas dengan munculnya dua kelompok pemberontak yaitu *Sudan Liberation Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM). Pemberontakan dilakukan terhadap pemerintah Sudan dengan melakukan penyerangan-

penyerangan terhadap instalasi militer pemerintah. Hal ini mereka lakukan karena ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dalam bidang ekonomi dan politik antara pusat kota dan wilayah pinggiran seperti Darfur. Para pemberontak ini mendapatkan pasokan senjata dari Libya melalui pasar gelap pasca perang yang terjadi di Libya. Dengan semakin meningkatnya penyerangan yang dilakukan oleh SLA dan JEM, pemerintah menggunakan pasukan Janjaweed untuk membendung dan melawan pemberontakan. Pasukan Janjaweed terdiri dari para pasukan elit dari etnis arab di Sudan. Setelah berbagai sokongan dan fasilitas penuh dari pemerintah Sudan kelompok ini justru menyerang penduduk desa yang tidak bersalah di Darfur.

Berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Sudan kepada Janjaweed ternyata justru menimbulkan permasalahan baru. Sejak Oktober 2003 Janjaweed tidak lagi hanya memerangi pemberontak tapi juga melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Janjaweed melakukan pengusuran terhadap pemukiman warga yang berada di daerah yang menjadi pusat para pemberontak. Sejak tahun 2003 tercatat sekitar 1,2 juta orang sebagai *Internally Displaced Person* (IDP) dan 170.000 diungsikan ke Chad.¹ Total korban jiwa dari konflik yang terjadi di Darfur menurut laporan dari PBB berjumlah sekitar 200.000 jiwa.² Janjaweed juga tercatat telah melakukan pelanggaran HAM dalam jumlah besar. Mulai dari pembunuhan rakyat sipil, penculikan, penyiksaan, pembakaran desa, dan perampokan.

Fenomena lainnya adalah perempuan-perempuan yang menjalankan tugasnya di kamp-kamp pengungsian sering kali diculik dan diperkosa berulang-ulang kali. Jumlah perempuan korban perkosaan yang berhasil lolos dan mampu mencapai pengungsian di Chad berjumlah 250 orang dan diperkirakan 250 perempuan lainnya masih tersekap di kamp milisi.³ Selain itu menurut laporan UNIFEM, kasus pemerkosaan terjadi ketika perempuan-perempuan ini melakukan tugasnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air. Pemerkosaan terjadi di antara hutan dan desa ketika mereka berjalan untuk melakukan tugasnya.

¹ Sudan, Darfur Rape as a weapon of war Sexual violence and its consequences pdf, dari *Amnesty International Report*, (www.amnesty.org), hal 10 [diakses pada 4 April 2012]

² unit to accompany the film DARFUR NOW and the book NOT ON OUR WATCH pdf, dari (www.facinghistory.org) hal 10, [diakses pada 4 April 2012]

³ Amnesty Internasional, *Sudan Darfur: Rape as a Weapon of War, Sexual Violence and Its Consequences*, (London: AI, 2004), hlm. 3. Dalam Fitriani, *Kontribusi Perspektif Feminis Dalam Studi Hubungan Internasional: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Perkosaan Perempuan Di Wilayah Konflik*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006)

Akibat dari pemerkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi secara besar-besaran ini yaitu kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin meluas. Ironisnya kebanyakan dari perempuan korban pemerkosaan tidak mengetahui ayah dari anak yang dikandungnya akibat dari perkosaan yang sering dialami. Hal ini menyebabkan berbagai dampak bagi para perempuan mulai dari fisik hingga psikologis. Para perempuan yang hamil akibat diperkosa oleh pasukan Janjaweed akan dijauhi dan dianggap tabu karena mengandung anak dari musuh. Tidak hanya itu perempuan yang sudah menikah dan menjadi korban bahkan akan ditolak kembali oleh suami-suami mereka. Selain pemerkosaan para perempuan ini juga menjadi korban dari praktek kekerasan yang biasa disebut *Female Genital Mutilation* (FGM).

Disebabkan karena situasi yang semakin memburuk dan terjadinya pelanggaran HAM dimana-mana, pada tahun 2006 PBB mengirimkan berbagai pasukan keamanan ke Darfur. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB mengutus UNIFEM untuk turun dan menangani masalah ini. UNIFEM merupakan dana pembangunan untuk perempuan yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNIFEM berada dibawah naungan UN Women. UNIFEM menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi bagi perempuan.⁴

Peneliti tertarik untuk menganalisa pengaruh dari perspektif feminisme melalui efektivitas UNIFEM di Darfur dalam program perlindungan perempuan di daerah konflik. Mengingat peran dan efektivitas UNIFEM untuk melindungi hak-hak perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dan sebagai wadah bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pada tahun 2006 UNIFEM masuk ke Darfur untuk melihat situasi dari perempuan-perempuan tersebut. Beberapa tindakan telah dilakukan oleh UNIFEM untuk mengembalikan hak-hak serta menghentikan kekerasan yang dialami oleh mereka. Feminisme sebagai perspektif yang melihat gender memiliki tempat dalam politik dan diplomasi memandang pentingnya perlindungan terhadap perempuan di daerah konflik. Berdasarkan hal tersebut maka yang akan menjadi permasalahan untuk dieksplorasi dalam hal ini adalah pengaruh perspektif feminis dalam program UNIFEM pasca konflik sipil di Darfur tahun 2006-2010.

⁴ CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, United Nations Development Fund For Women, hlm 3

Untuk menjawab perumusan permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan perspektif feminis. Seperti yang dikatakan oleh Jill Steans dan Lloyd Pettiorid bahwa meskipun sarjana feminis memiliki fokus perhatian mereka masing-masing, namun sebagian besar fokus terhadap perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Asumsi dasar dari perspektif ini ingin membebaskan perempuan dari “kekangan” yang selama ini terbentuk secara sosial bahwa kedudukan wanita berada di bawah pria.

Fenomena yang menarik perhatian dari UNIFEM untuk turun ke Darfur yaitu tingginya tingkat pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Dilihat dari perspektif Feminisme pemerkosaan merupakan salah satu tindakan teror politik terhadap kelompok tertindas. Di dalam tulisannya, Anuradha M. Chenoy menggabungkan tulisan-tulisan dari para pemikir feminis dalam menganalisa posisi perempuan di wilayah konflik⁵, antara lain yaitu:

1. Sebagai korban dan pengungsi
2. Sebagai relasi dari para angkatan bersenjata yang turun berperang
3. Sebagai pendukung pergerakan
4. Sebagai kombatan yang dipersenjatai
5. Sebagai pendukung kehidupan (melahirkan generasi penerus, memasak, merawat korban, dst)
6. Sebagai pembuat perdamaian

Dari analisa posisi perempuan tersebut terlihat bahwa di dalam konflik perempuan memang tidak turun langsung dalam perang namun identitas dari tubuhnya menunjukkan budaya dan genetik dari suku ataupun agama tertentu yang berbeda dari pihak musuhnya. Hal ini seringkali dijadikan alat dalam peperangan. Selain menggunakan perspektif feminis peneliti juga menggunakan teori peran dari Organisasi Internasional dengan fokus terhadap peran dari (*Intergovernmental Organizations*) IGO. Menurut resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB nomor 288 (x) 27 Februari 1950 IGO didefinisikan sebagai berikut:

*“Every international organization which is not created by means of inter-governmental agreements shall be considered as a non-governmental international organization”*⁶

Definisi IGO yang diungkapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut guna menunjukkan perbedaan antara IGO dan *International Non-Governmental Organization* (INGO). IGO merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh perjanjian resmi antara dua atau lebih

⁵ Anuradha M. Chenoy, “Women, War and Peace: Indian Versions” dalam Fitriani, *Kontribusi Perspektif Feminis Dalam Studi Hubungan Internasional: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Perkosaan Perempuan Di Wilayah Konflik*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006)

⁶ Clive, Archer. 2001, *International Organization (Third Edition)*, London dan New York: Routledge, hal 35

pemerintah. Organisasi ini dapat didirikan secara global, regional maupun fungsional untuk tujuan yang luas maupun sempit. IGO dibentuk dengan tujuan untuk dapat melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional bersama dari negara-negara anggotanya.

Pembahasan

Profil Unifem Dan Feminisme

Prinsip dasar dari kesetaraan antara pria dan wanita pertama kali diperkenalkan pada tahun 1945, di dalam piagam PBB dan kemudian dicantumkan di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Sejak saat itu berbagai strategi dan program mulai bermunculan dalam fokus meningkatkan status perempuan. Kemajuan berikutnya dalam hal peningkatan status perempuan terlihat pada tahun 1972. Pada tahun ini Majelis Umum PBB menetapkan tahun 1975 menjadi *International Women's Year* dengan tema *Equality, Development and Peace*. Selanjutnya, berawal dari agenda tahunan ini menghasilkan proposal pembentukan dana sukarela PBB untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Hal ini menjadi titik awal dari berdirinya UNIFEM. Puncak dari acara tahunan PBB ini yaitu diadakannya Konferensi Perempuan Dunia pertama pada 19 Juni hingga 2 Juli 1975 di Mexico City.⁷

Feminisme diartikan sebagai paham yang menjadikan gender sebagai fokus utama. Gender diartikan pemisahan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perannya di dalam masyarakat atau berdasar status sosial bukan berdasarkan ciri biologis.⁸ Gender seringkali mengasumsikan perempuan tidak cukup mampu untuk membuat sebuah keputusan yang rasional karena perempuan seringkali melibatkan perasaan mereka dalam membuat suatu keputusan sementara laki-laki berdasarkan fakta dan logika. Perspektif feminis secara ilmu sosial terbagi kedalam beberapa kelompok, dan yang paling umum ada empat kategori, yaitu feminis liberal, feminis marxis, feminis radikal dan feminis post-strukturalis.

Kajian keamanan di dalam feminis terlihat dari tulisan oleh J. Ann Tickner di dalam bukunya yang berjudul *Gender In International Relations; Feminist Perspective on Achieving Global Security* pada tahun 1992. Feminis mengartikan keamanan sebagai sesuatu yang mencakup ke dalam berbagai dimensi dan level. Maksudnya, segala jenis bentuk kekerasan mulai dari fisik, struktural, hingga ekologis. Ancaman keamanan di dalam pandangan feminis mencakup hingga kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, kemiskinan, subordinasi gender,

⁷ UNIFEM Australia, our story 1990-2010. UN Women. Hal 13

⁸ Watson, Alison. "Gender and Other "Others," dalam Trevor C. Salmon dan Mark F. Imber, 2008, *Issues In International Relations [2nd edition]*, Routledge, London, hal. 196

kerusakan lingkungan ekologis dan peperangan. Mereka menganggap keamanan dimulai dari personal hingga tingkat yang jauh lebih besar nantinya seperti politik nasional dan internasional.

Konflik Sipil dan Pelanggaran Hak Perempuan DI DARFUR

Sepanjang sejarah tercatat yang menjadi korban dengan jumlah terbesar yaitu perempuan dan anak-anak. Dampak yang mereka alami tidak hanya menjadi korban dari kekerasan sebagai efek dari konflik itu sendiri, tetapi juga hak-hak dasar mereka sebagai manusia terabaikan. Perempuan di daerah konflik lebih sering mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, dan *Gender Based Violence*. Hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan hak untuk berpartisipasi dalam resolusi konflik juga dihalangi. Kelemahan dan ketidakberdayaan mereka sebagai perempuan digunakan untuk melindungi kelemahan dan ketidakberdayaan dari keluarga dan komunitas mereka itu sendiri. Semua itu dilakukan untuk menutupi kelemahan mereka agar tidak dipandang buruk.

Selain dijadikan alat perlindungan perempuan juga dijadikan alat terror dengan cara melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk memberikan terror terhadap pihak lawan. Ketika konflik mereda pun keadaan yang dialami perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perempuan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit hingga menjadikan prostitusi sebagai cara pemenuh kebutuhan.

Begitu juga yang terjadi pada konflik Darfur. Konflik di Darfur dimulai pada bulan April 2003 dan telah menyerang sekitar 2,75 juta orang, angka ini merupakan sepertiga dari penduduk di wilayah ini.⁹ Mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah dan menetap di kamp-kamp pengungsian yang berada di kota besar. Menurut laporan dari *Refugees International*, sejak tahun 2003 konflik antara kelompok pemberontak dan pemerintah Sudan beserta sekutunya, pasukan Janjaweed telah menghancurkan ratusan desa, dan sekitar 2,2 juta orang telah menjadi pengungsi.¹⁰ Perkiraan kematian dari konflik ini hingga tahun 2007 berjumlah 200.000 sampai 400.000 jiwa.¹¹ Pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerah ini telah menarik perhatian dunia, terutama dalam hal tingginya tingkat pemerkosaan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

⁹ Grace Okonji. *Final Report: End Of Programme Evaluation Of The Un Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme ; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan - July 2008 – July 2010*, 2011. UN Women

¹⁰ Sarah Martin. *Ending Sexual Violence In Darfur: An Advocacy Agenda, 2007*, Refugees International, hal 1

¹¹ *Ibid*

Sudan merupakan negara yang sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1956 dipenuhi oleh konflik sipil.¹² Sudan adalah negara dengan penduduk yang berasal dari berbagai etnis dan agama, dan keberagaman ini menjadi sumber konflik sepanjang sejarah Sudan. Konflik yang terjadi di Darfur merupakan imbas dari konflik yang telah terjadi sebelumnya di Sudan, yaitu konflik antara Utara dan Selatan. Konflik antara Sudan utara dan selatan mulai terjadi setahun menjelang kemerdekaan Sudan, yaitu pada tahun 1955. Pada saat itu Sudan Selatan telah dipengaruhi oleh Inggris sejak masa penjajahan sedangkan Sudan utara dipengaruhi oleh Mesir yang dekat kepada Amerika Serikat. Oleh sebab itu pada saat kemerdekaan Sudan tahun 1956 diwarnai dengan perang sipil pertama yang berakhir pada tahun 1972.¹³ Berhentinya perang sipil pertama dengan disepakatinya perjanjian Addis Ababa (*Addis Ababa Agreement*) yang dipelopori oleh Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches*).¹⁴

Pecahnya perang sipil kedua yang terjadi di Darfur disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *survival*, yaitu menyangkut bagaimana bertahan hidup di Afrika. Hal yang menjadi faktor *survival* ini yaitu kekeringan, jumlah penduduk yang besar, serta desertifikasi (kondisi tanah yang semakin kering karena kekurangan air hingga terbentuk menjadi gurun).¹⁵ Selain itu permasalahan etnis juga menjadi pemicu paling besar dari konflik ini. Darfur merupakan wilayah yang dihuni oleh banyak etnis, yaitu etnis arab dan etnis afrika yang merupakan penduduk asli.

Berbagai permasalahan memicu munculnya kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka *Darfur Liberation Front* (DLF) yang kemudian mengubah nama mereka menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM).¹⁶ Konflik Darfur bermula pada tanggal 26 Februari 2003 ketika DLF menyatakan telah melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah di kota Golo, Jebel Marra.¹⁷ SLM kemudian bersama dengan kelompok pemberontak lain yang bernama *Justice and Equality Movement* bergabung melawan pemerintah pusat. JEM merupakan kelompok yang terdiri dari orang muslim Afrika non-arab dari suku Kobe Zaghawa dan SLM dari suku Fur, Masalit serta suku Wagi Zaghawa. Tujuan awal diturunkannya pasukan Janjaweed oleh

¹² *Beyond Darfur: War's Impact on Sudanese Women and Their Hopes for a Peaceful Future*, 2006, Women for Women International, hal 7

¹³ Abdul Hadi Adnan. 2006. *Penyelesaian Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*. Jurnal UNPAS. Jakarta; hal 3

¹⁴ Maklumat Politik Sudan. [<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>] [diakses pada 27 Desember 2012]

¹⁵ *Looking to water to find peace in Darfur*". Reuters AlertNet. 2007-07-30, [<http://www.alertnet.org/db/blogs/1265/2007/06/30-100806-1.htm>], [diakses pada 28 Desember 2009]

¹⁶ *Ibid*, hal 28

¹⁷ *Ibid*

pemerintah yaitu untuk mengatasi para kelompok pemberontak. Namun, pasukan ini tidak hanya menyerang kelompok pemberontak, mereka juga menyerang penduduk sipil.

Pemeriksaan dilakukan oleh pasukan Janjaweed ini bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis fur, Zaghawa dan Masalit yang diutus oleh pemerintah Sudan.¹⁸ Pemeriksaan merupakan tindak kekerasan fisik yang dapat langsung menyebabkan kematian. Tradisi FGM atau mutilasi terhadap genital perempuan yang dilaksanakan di negara ini memberikan konsekuensi kesehatan yang lebih besar. Cedera yang mereka alami berupa cedera fisik yang parah karena tidak hanya pemaksaan seksual mereka juga mengalami serangan oleh tongkat dan cambuk. Sekitar 4% dari korban pemeriksaan yang dilaporkan ke Médecins Sans Frontières (MSF) mengalami patah tulang dan luka bakar setelah serangan. Penyebaran HIV/AIDS melalui infeksi secara seksual menempatkan hidup para perempuan ini dalam bahaya, bahkan bagi kehidupan anak-anak mereka.¹⁹

Di Sudan fenomena FGM telah berlangsung sejak lama. FGM dilakukan terhadap anak-anak perempuan yang menuju dewasa atau perempuan yang belum menikah. Menurut laporan dari UNICEF pada tahun 2000, diperkirakan sekitar 89% perempuan di Sudan Utara dengan rentang usia antara 15-49 tahun telah mengalami FGM.²⁰ Sedangkan menurut sebuah survei demografi dan kesehatan yang dilakukan terhadap 5860 perempuan di Sudan antara tahun 1996 hingga 2000 oleh *Save the Children* di Swedia dan *Sudan National Committee on Traditional Practices* (SNCTP) menunjukkan bahwa sekitar 91% dari populasi perempuan di daerah pedesaan dan 89% perempuan di daerah perkotaan di Sudan telah mengalami FGM.²¹ Tradisi ini mulai dilakukan pada anak perempuan berumur sepuluh tahun dan dilakukan pada bulan april hingga juli yang merupakan masa liburan sekolah.²² Perempuan dewasa yang belum menikah dan belum melaksanakan tradisi ini ditekan untuk melaksanakannya sebelum menikah. Faktor agama, budaya dan sosial dalam keluarga dan masyarakat menjadi penentu dalam pelaksanaan tradisi ini.

¹⁸ *Sudan. Five Years On: No Justice for Sexual Violence in Darfur*, 2008, Human Rights Watch Hal 6

¹⁹ Médecins Sans Frontières-Holland, *Crushing Burden of Rape: Sexual Violence in Darfur*, Maret 2012. [<http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2005/sudan03.pdf>] [diakses pada 27 Desember 2012]

²⁰ Unicef 2000 dalam *Report Female Genital Mutilation in Sudan and Somalia*, LandInfo: Country of Origin Information Center, 2008 [http://www.landinfo.no/asset/764/1/764_1.pdf] [diakses pada 29 Desember 2012]

²¹ *Household Health Survey* (1999) dalam *Report Female Genital Mutilation in Sudan and Somalia*, LandInfo: Country of Origin Information Center, 2008 [http://www.landinfo.no/asset/764/1/764_1.pdf] [diakses pada 29 Desember 2012]

²² *Ibid*

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan Oleh Unifem Di Darfur

UNIFEM telah hadir di Sudan sejak tahun 1994, namun pada saat itu UNIFEM berperan sebagai media yang mendukung untuk dilaksanakannya dialog antara perempuan Sudan Utara dan Sudan Selatan.²³ Dialog tersebut berisi tentang agenda pengembangan perempuan Sudan. Kondisi perempuan Sudan saat itu telah menarik perhatian UNIFEM, terutama dengan pecahnya konflik sipil di Darfur.

Pada bulan April 2005, UNIFEM mengikuti konferensi yang membahas mengenai negara donor untuk Sudan di Oslo, Norwegia, dan mendesak untuk melakukan suatu tindakan untuk perempuan Sudan dengan fokus pada enam bidang, yaitu pemerintahan dan hukum, GBV, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, kebijakan ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif dan pelayanan sosial. Agenda ini kemudian berlanjut dengan diadakannya pertemuan persetujuan Sudan di Oslo, Norwegia pada Mei 2005.²⁴

Setelah dibentuknya dokumen program UNIFEM untuk perempuan Sudan kemudian menghasilkan 2 rancangan kerja yaitu: “*Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan*” (2005 - 2006) dan “*Gender Justice in Sudan*” (2005 – 2008).²⁵ Fase berikutnya merupakan bagian dari dua program utama ini dilakukan pada tahun 2008 hingga 2010 yaitu “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*”.²⁶ Program UNIFEM ini berdasarkan Deklarasi Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 (2000).²⁷

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Darfur telah masuk ke dalam kategori kejadian luar biasa. Kaum feminis menganggap kekerasan terhadap perempuan cenderung mengarah kepada karakteristik seksual. Oleh karena itu feminis sangat memperjuangkan isu untuk mendapatkan tanggapan di tingkat Internasional mengenai isu yang dihadapi oleh

²³ UNIFEM Projects Around the Globe (<http://www.unwomen-usnc.org/projectsaroundtheglobe>) [diakses pada 10 Januari 2013]

²⁴ Kathleen Linda Webb. *Final Report; End of Programme Evaluation ‘Protecting and Promoting Women’s Rights and Leadership in Sudan’ (2005-2006) and ‘Gender Justice in Sudan’ (2005-2008)*, UNIFEM, 2008. Hal ii

²⁵ *Ibid*

²⁶ Grace Okonji. *Final Report: End Of Programme Evaluation Of The Un Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme ; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan - July 2008 – July 2010*, 2011. UN Women, hal 6

²⁷ *Ibid*

perempuan-perempuan di daerah konflik. Jika melihat kesepakatan dan traktat internasional yang dihasilkan sebagai alat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, sejauh ini sudah terdapat setidaknya hingga 6 deklarasi besar dunia,²⁸ yaitu:

1. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) pada tahun 1993;
2. Bab 4 dalam Deklarasi Beijing dan Dasar Aksi (*Beijing Declaration and Platform of Action*) mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan ini telah diadopsi oleh Konferensi Perempuan Dunia pada tahun 1995 oleh PBB;
3. Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan perang (*International Criminal Court - ICC*) pada tahun 1998 yang mencantumkan kekerasan seksual seperti; perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi dan pemaksaan kehamilan di dalam definisi atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang dan dapat dijatuhi hukuman;
4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW*) tahun 1979 dan Protokol Opsional-nya tahun 1999 yang menyatakan semua negara menjalankan “kebijakan untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan”, memberdayakan perempuan untuk menuntut haknya ke tingkat nasional dan membuat tuntutan tersebut dipandang secara signifikan;
5. Tinjauan 5 tahun Deklarasi Beijing (*Beijing + 5 Review*) tahun 2000 yang menyatakan kriminalisasi dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan adopsi cara-cara mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang berbasis ras;
6. Deklarasi Millenium yang diadakan oleh PBB pada tahun 2000 yang salah satu tujuannya adalah untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendukung deklarasi sebelumnya.

Berdasarkan 6 deklarasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut, UNIFEM kemudian masuk ke Darfur untuk menjalankan program perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di wilayah itu. UNIFEM memiliki dua program yang dijalankan di Darfur yaitu program, *Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan*” (2005 - 2006) dan “*Gender Justice in Sudan*” (2005 – 2008). Namun pada tahun 2008 hingga 2010 UNIFEM membentuk program tambahan yang masih merupakan bagian dari dua program sebelumnya, yaitu “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur.*”²⁹

Meskipun program ” *Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*” masih bagian dari dua program sebelumnya, namun program ini

²⁸ *Indepth: Gender-Based Violence*, diakses dari [http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html] [diakses pada 14 Januari 2013]

²⁹ Grace Okonji, loc. cit.,

lebih memfokuskan diri pada perlindungan perempuan dari GBV yang merupakan objek dari penelitian ini. Program ini menggunakan sistem rantai hasil (*result chain*) dan memiliki 3 tujuan utama, 8 *outcomes* (hasil), 24 *Outputs* (keluaran), dan 16 kegiatan.³⁰ Tiga tujuan dari program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*”, yaitu:

1. Untuk mengurangi kerentanan perempuan dari paparan GBV dan memaksimalkan penegakkan HAM di Darfur Selatan;
2. Untuk memperkuat kapasitas institusi lokal dan mekanisme kegiatan yang bergerak dalam pengamanan, pertahanan dan pemenuhan hak-hak masyarakat terutama perempuan.
3. Untuk mempromosikan akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang berperan besar dalam keselamatan, keamanan dan kehidupan pengungsi perempuan di Darfur.

Sedangkan yang menjadi *inputs* dari program ini yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan selama menjalankan program. Semua program UNIFEM di Darfur menggunakan dana dari hasil kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga. Selanjutnya program kerja dari program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*” antara lain³¹:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakkan dan pengakuan Hak perempuan.
2. Meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang aman dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh pengungsi perempuan.
3. Memasarkan hasil dari kerajinan yang dibuat oleh pengungsi perempuan untuk meningkatkan perekonomian.
4. Mengadakan dialog untuk meningkatkan pengetahuan dan menciptakan rasa kekompakan dan saling memilik antara pengungsi perempuan.
5. Mendapatkan kepercayaan bagi UNIFEM sebagai organisasi yang efektif untuk melindungi perempuan dan membantu meningkatkan kesadaran hak-hak perempuan dan pelaporan kasus kekerasan.
6. Memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan di pengungsian akan HAM yang seharusnya dapat mereka nikmati serta memberikan pelatihan dalam menegakkan Hak di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang selama ini diabaikan.
8. Meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi perempuan yang selama ini rentan mengalami kekerasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9. Mengurangi terjadinya GBV yang selama ini menimpa perempuan-perempuan di Darfur.

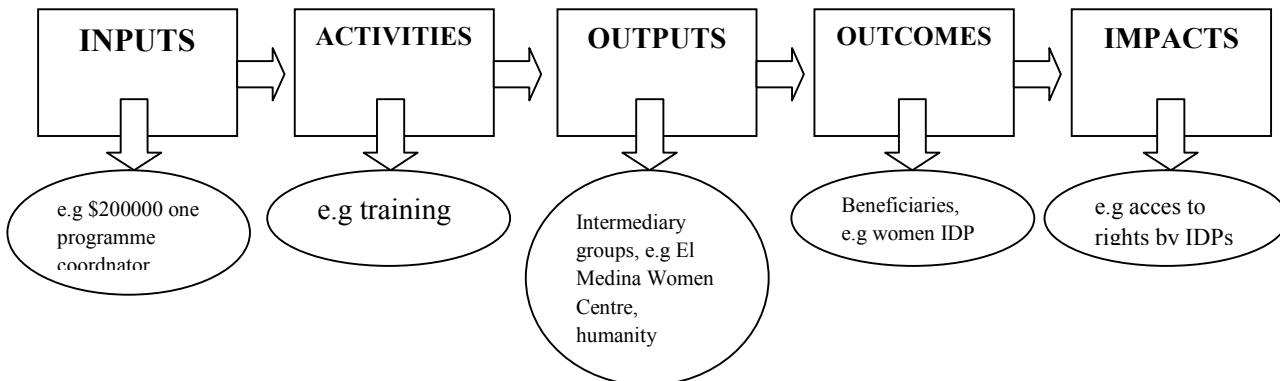
Program kerja ini menjadikan tingginya intensitas terjadinya GBV di Darfur menjadi fokus utama. Sistematis dari program kerja ini dapat dilihat dari diagram rantai hasil berikut:

³⁰ *Ibid*, hal 12

³¹ *Ibid*, hal 14

Gambar 4.1

Darfur Programme Results Chain



Sumber: Grace Okonji. *Final Report: End Of Programme Evaluation Of The Un Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme ; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan - July 2008 – July 2010, 2011. UN Women*

Berdasarkan diagram program kerja tersebut terlihat bahwa dalam menjalankan program masing-masing objek memberikan pengaruh yang besar dan saling berkaitan. *Input* berupa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang kemudian digunakan untuk melaksanakan kegiatan seperti memberikan pelatihan dan kemudian memberikan keluaran berupa lembaga-lembaga dan kelompok yang bertindak sebagai perantara dalam memberikan pelayanan kepada pengungsi dan masyarakat. Selanjutnya kelompok perantara akan memberikan pelayanannya kepada pengungsi perempuan serta perempuan korban kekerasan. Terakhir sebagai hasil dari dijalankannya program kerja yaitu dampak terhadap para pengungsi perempuan, yaitu dengan terpenuhinya Hak-hak mereka.

Implementasi program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*” yang menggunakan sistem rantai hasil (*results chain*) ini dapat terlihat dari *Outcomes* atau hasil yang kemudian menuju hasil dari program tersebut. *Outcomes* (hasil) tersebut terdiri dari 9 poin,³² yaitu:

1. Dibentuknya lembaga gabungan multi sektor yang membahas mengenai kerentanan perempuan terhadap GBV;
2. Peningkatan pemahaman pengungsi perempuan terhadap hak-hak asasi mereka dan kapasitas untuk dapat menikmati hak-hak mereka;
3. Peningkatan kapasitas pengungsi perempuan untuk membuat keputusan penting mengenai kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan dan partisipasi dalam peran public terhadap perdamaian di Darfur;

³² *Ibid*

4. *Women's Center* yang berada di kamp-kamp pengungsian dapat terorganisir dan dikelola dengan baik;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan sehingga keselamatan pengungsi perempuan terbukti membaik, hal ini merupakan hasil dari meningkatnya keamanan;
6. Mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk GBV lainnya;
7. Meningkatkan keefektifitasan dari kerjasama yang mendukung cara-cara kreatif dalam melindungi perempuan, memobilisasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran tentang perlindungan perempuan pengungsi;
8. Mengurangi terjadinya impunitas (kebijakan melepaskan pelaku kejahatan dari sanksi);
9. Mengurangi insiden dan jumlah korban yang mengalami GBV.

Implementasi dari program ini terlihat dengan adanya perkembangan yang ditunjukkan menuju tercapainya hasil yang direncanakan. Perkembangan pertama yang terlihat yaitu dukungan untuk perkembangan perekonomian pengungsi perempuan menunjukkan hasil yang memuaskan. Pemberdayaan perekonomian perempuan dilaksanakan dengan mengembangkan berbagai potensi. UNIFEM menjalankan program bekerjasama dengan beberapa mitra di Darfur, seperti *Al Madina Women and Development Centre, Nahda Women's and Children Development Organization, Elham Charity Organization and People's Organization for Rehabilitation and Development*.

Program dijalankan dengan memberikan pelatihan dalam mengatur usaha kecil seperti menenun, beternak unggas, membuat pasta dan menjahit. Sekitar 295 perempuan di kamp-kamp di Otash dan Dereige berhasil mengakses jasa keuangan. Sementara itu sekitar 400 orang perempuan lainnya mendapatkan pelatihan keterampilan dalam bidang kewirausahaan. Pelatihan ini seperti memberikan keterampilan pemasaran, biaya produksi, dan pasar *Value Chain*. Kegiatan ini membantu meningkatkan penghasilan.

Perkembangan berikutnya yaitu UNIFEM sebagai organisasi yang menyediakan dana dan teknis memberikan dukungan kepada organisasi nasional seperti *Nahda for Women and Children Development Organization, Ehlam Charity Organization and People's Organization for Development and Rehabilitation, University of Nyala, the State Committee for Combating Violence against Women*, dan *the El Medina Centre for Gender and Development* dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Organisasi-organisasi lokal ini selain memberikan bantuan berupa program mata pencaharian mereka juga memberikan pelatihan teknis tentang pencegahan dari GBV dan HAM. Hasil yang telah ditunjukkan dari program pelatihan ini yaitu diberikannya pelatihan kepada 88 polisi pemerintah Sudan, 80 polisi UNAMID, 25 petugas polisi wanita dan 1.325 polisi relawan.

Program kerja yang dijalankan oleh UNIFEM sesuai dengan pandangan dari penganut feminis konstruktivis dalam pandangan akan keamanan. Feminis konstruktivis menganalisa mengenai keamanan perempuan dalam perang yang tidak dianggap sebagai wacana keamanan yang utama. Menurut mereka keamanan terhadap penduduk dalam perang adalah menjadi prioritas dari suatu negara. Perang menjadikan kekerasan seksual dan pemerkosaan menjadi alat teror bagi musuh mereka, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dijadikan medan perang secara simbolik. Selain itu pemerkosaan juga dijadikan alat genosida dengan menggunakan tubuh dan kemampuan reproduksi perempuan menunjukkan fenomena ini penting untuk mendapatkan perhatian internasional. Oleh karena itu UNIFEM sebagai organisasi yang fokus terhadap kesejahteraan perempuan memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan-perempuan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa feminis memberikan pengaruh di dalam program kerja UNIFEM di Darfur dengan menjadi acuan bagi UNIFEM untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan dan GBV yang merupakan efek dari konflik sipil yang terjadi di Darfur. Pemerkosaan dan kekerasan seksual dijadikan alat perang untuk meneror pihak musuh dengan menggunakan tubuh perempuan.

UNIFEM adalah organisasi yang didedikasikan oleh PBB untuk memajukan hak perempuan dan mencapai kesetaraan jender dengan menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk program-program inovatif dan strategi yang mendorong pemberdayaan perempuan. Program-program yang dijalankan oleh UNIFEM memiliki landasan adalah hak untuk setiap perempuan hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pengaplikasian landasan tersebut dapat terlihat dari dua program kerja yang dijalankan UNIFEM dari tahun 2006 hingga 2010 di Darfur yaitu, *Protecting and Promoting Women's rights and Leadership in Sudan* (2005 - 2006) dan *Gender Justice in Sudan* (2005 – 2008) yang kemudian dilanjutkan dengan *Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur* pada tahun 2008 hingga 2010.

Referensi

Buku:

Archer, Clive., 2001. *International Organizations*. 3rd ed. London: Routledge.

CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan),. 2004. *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. New Delhi: United Nations Development Fund For Women

I Nyoman Samaryadi, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Mas'ood, Mochtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S

SKRIPSI DAN THESIS:

Rahmawati, Fierda Milasari. *Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

Fitriani., 2006. *Kontribusi Perspektif Feminis Dalam Studi Hubungan Internasional: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Perkosaan Perempuan Di Wilayah Konflik*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Internet:

About UNIFEM, (<http://www.unifem.org/about/>) [diakses pada 16 April 2012]

Gender-Based Violence, diakses dari [http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html] [diakses pada 14 Januari 2013]

Ginette Le Breton, "UNHCR, UNFPA fund surgery for refugee and local women in Chad," *UNHCR News Stories*, March 17, 2007. [<http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=4239519f4>] [diakses pada 28 Desember 2012]

Looking to water to find peace in Darfur". Reuters AlertNet. 2007-07-30, [<http://www.alertnet.org/db/blogs/1265/2007/06/30-100806-1.htm>], [diakses pada 28 Desember 2009]

Laporan:

Backgrounder UNIFEM Worldwide [pdf]. Diakses dari (http://www.unifem.org/campaigns/sayno/docs/SayNOunite_Backgrounder_UNIFEMworldwide.pdf) [diakses pada 29 Oktober 2012]

Beyond Darfur: War's Impact on Sudanese Women and Their Hopes for a Peaceful Future. Women for Women International. 2006.

Human Rights Watch, *Sexual Violence and its Consequences. A Human Rights Watch Briefing Paper*. 2005. Format pdf. Diakses dari [<http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=1069>]

Médecins Sans Frontières-Holland, *Crushing Burden of Rape: Sexual Violence in Darfur*, Maret 2012. [<http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2005/sudan03.pdf>] [diakses pada 27 Desember 2012]

Okonji, Grace. *Final Report: End Of Programme Evaluation Of The Un Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme ; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan - July 2008 – July 2010*. 2011. UN Women

UNIFEM Australia, our story 1990-2010. UN Women.